

**MULTISISTEM SILVIKULTUR  
PILIHAN TERBAIK UNTUK MENGAKOMODIR  
KOMPLEKSNYA PERSOALAN DALAM PENGELOLAAN  
HUTAN ALAM PRODUKSI**

Oleh:

**Nana Suparna**

Direktur PT. Sari Bumi Kusuma

**RAGAM TUNTUTAN PADA HUTAN**

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, saat ini mendapatkan berbagai macam "tuntutan" dari berbagai pihak. Beberapa tuntutan ini bahkan cenderung menjadikan hutan sebagai "terdakwa", sementara disisi lain hutan sepertinya "dikorbankan" untuk kepentingan lain dengan berbagai justifikasi.

Tuntutan kepada hutan dan kehutanan saat ini antara lain adalah :

1. Fungsi lindung hutan alam dan sebagai sumber keaneka ragaman hayati (*biodiversity*) harus tetap dipertahankan. Bencana alam seperti kekeringan, banjir, tanah longsor tidak bisa dilepaskan dari keberadaan hutan, baik dari sisi prosentase luasan wilayah maupun kondisinya. Dengan demikian pengelolaan hutan alam harus tetap dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kelestariannya.
2. Terjadinya perubahan iklim global, suka tidak suka hutan dan kehutanan juga menjadi sorotan sekaligus tumpuan. Oleh karena itu tuntutan untuk adanya kegiatan penanaman pada lahan terbuka dan sekaligus menjaga kelestarian hutan terutama pada kawasan hutan semakin besar.
3. Pertambahan penduduk. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data kependudukan tahun 2008 berjumlah 220 juta jiwa. Menurut Kompas tanggal 25 Agustus 2008, karena adanya kegagalan program keluarga berencana di Indonesia, maka diperkirakan akan terjadi ledakan penduduk (*baby booming*) pada tahun 2015 dan 2025. Dengan adanya pertambahan penduduk yang tinggi, maka diperlukan ketersediaan lahan untuk itu, baik lahan sebagai tempat tinggal maupun lahan untuk memenuhi kecukupan pangan dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan lahan tersebut maka kawasan hutan biasanya "dikorbankan" karena merupakan jalan keluar yang paling mudah, disamping karena hutan alam dinilai mempunyai "produktivitas" yang rendah. Disamping itu dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan ada pertambahan angkatan kerja yang memerlukan kesempatan kerja dan berusaha. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi pemanfaatan lahan, agar dapat menciptakan lapangan kerja dan kegiatan usaha yang bisa menyerap tenaga kerja yang semakin meningkat, sekaligus dapat mengurangi tekanan terhadap hutan alam.

4. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat menuntut adanya perluasan lahan untuk usaha dan kegiatan, terutama usaha sektor pertanian dan perkebunan. Keperluan lahan ini akan memberikan tekanan terhadap kawasan hutan, terutama terhadap kawasan hutan yang tidak diusahakan maupun pada hutan yang tidak mempunyai produktivitas yang tinggi.
5. Tuntutan perluasan kegiatan perladangan oleh masyarakat sekitar hutan, khususnya para peladang berpindah. Dengan keterbatasan lahan yang ada seperti sekarang ini disamping penambahan penduduk, maka sebenarnya kegiatan perladangan berpindah seperti saat ini yang boros lahan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Akan tetapi karena mereka belum mampu mendapatkan kegiatan usaha yang lain, maka terpaksa mereka terus melakukan kegiatan perladangan berpindah sehingga menambah beban kepada hutan alam.
6. Tuntutan akan kebutuhan kayu yang semakin besar, padahal ketersediaan di alam yang semakin kecil mengakibatkan tekanan kepada hutan alam yang semakin berat jika pengelolaan hutan alam tidak ditingkatkan produktivitasnya.
7. Pengangguran tenaga kehutanan yang semakin besar dan belum dimanfaatkannya keahlian tenaga kehutanan secara profesional berdampak negatif pada dunia pendidikan kehutanan dan pasar tenaga kerja kehutanan itu sendiri.

Ketujuh tuntutan tersebut harus mampu diakomodir secara proporsional oleh kegiatan/bisnis di sektor kehutanan, sehingga optimalisasi pemanfaatan lahan dan peningkatan produktivitas hutan menjadi sesuatu yang harus dilakukan dan diintegrasikan dalam tiap kegiatan usaha kehutanan.

Cara peningkatan produktivitas hutan akan berbeda-beda tergantung dari kondisi tapak, kondisi tegakan dan faktor sosial ekonomi masyarakat disekitarnya. Peningkatan produktivitas hutan tidak bisa lepas dari sistim silvikultur yang diterapkan dan teknologi yang dipakainya.

Dengan demikian penerapan sistim silvikultur yang lebih dari satu sistim dalam suatu IUPHHK menjadi keniscayaan dalam rangka mencapai optimalisasi pemanfaatan lahan dan sekaligus peningkatan produktivitas hutannya. Dengan demikian dalam hal ini ada 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu optimalisasi pemanfaatan lahan, penggunaan sistim silvikultur yang lebih dari satu dan penerapan teknik budi daya yang intensif.

### **KONDISI UMUM HUTAN ALAM SAAT INI**

Kawasan hutan produksi di Indonesia yang berada di luar Pulau Jawa saat ini bisa dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kawasan yang dibebani hak pengusahaan hutan atau ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (HPH/IUPHHK-HA), kawasan dengan hak pengusahaan hutan tanaman

industri atau ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (HP-HTI/IUPHHK-HT) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), serta kawasan hutan Negara yang tidak/belum dibebani oleh hak pengusahaan hutan.

Pada saat ini, kawasan hutan produksi yang dibebani hak pengusahaan hutan masing-masing masih terpisah dalam unit manajemen yang berbeda dengan sistem silvikultur masing-masing. Pada HPH/IUPHHK-HA menggunakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan dengan segala variannya (TPTI, TPBP, maupun TPTJ), sementara pada HP-HTI/IUPHHK-HT adalah dengan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) dengan jenis *ex-situ*-nya yang monokultur.

Dengan unit manajemen dan pola pengusahaan yang terpisah, maka terdapat banyak daerah/lahan yang tidak/belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena dalam suatu areal IUPHHK hanya ada 1 (satu) sistem silvikultur, padahal di areal IUPHHK yang bersangkutan masih ada atau banyak lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan karena belum ada ketentuan yang membolehkan menggunakan lebih dari 1 sistem silvikultur. Disamping pada tiap IUPHHK belum dapat dilakukan kegiatan usaha kehutanan yang optimal karena belum diterapkannya sistem silvikultur yang bisa lebih dari 1 sistem, pada kawasan hutan ex HPH malah keadaannya terlantar karena tidak ada pengelolanya, dan malahan menjadi sumber kegiatan pembalakan liar dan perambahan hutan, yang sangat merugikan Negara dan merusak hutan. Pada areal-areal hutan ex HPH yang terlantar tersebut banyak yang karena tidak layak secara ekonomi untuk diusahakan dengan sistem TPTI, dan juga tidak memenuhi syarat untuk THPB, maka menjadi areal yang terlantar. Untuk kondisi areal seperti ini pilihan terbaik adalah menggunakan sistem yang lebih dari 1 sistem atau multisistem silvikultur dengan menggunakan teknologi budi daya yang intensif.

Pada kegiatan HPH/IUPHHK-HA dengan sistem silvikultur TPTI seperti yang berjalan saat ini belum dapat mengakomodir tuntutan eksternal karena :

- a. Riap yang kecil (kurang dari 1,0 m<sup>3</sup>/ha/th). Dengan riap yang kecil maka diperlukan luas areal yang diusahakan harus besar. Ini bertentangan dengan banyaknya keperluan lahan karena penambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Banyak lahan-lahan terbuka dan terlantar di areal HPH/IUPHHK-HA, yang disebabkan karena adanya kebakaran hutan maupun karena bekas perladangan yang tidak dimanfaatkan dan tidak dikelola dengan baik. Hal tersebut terjadi dikarenakan terkendala pada aturan yang ada (regulasi) dimana belum bisa diterapkannya sistem silvikultur yang lebih dari satu di satu IUPHHK. Penanaman tanah kosong di areal IUPHHK, walaupun ada tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi (sekedar ada tanaman), dan juga tidak terencana dan terintegrasi dengan baik sehingga tidak memenuhi prinsip-prinsip kelestarian hasil, hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan saja.

Sedangkan pada kegiatan pengusahaan hutan tanaman industri (HTI/IUPHHK-HT), masih ada anggapan pembukaan hutannya terlalu intensif, sehingga kurang menyisakan vegetasi alaminya. Masih banyak pro kontra masalah jenis monokultur dan jenis *ex situ* (jenis dari luar, bukan jenis lokal), penggantian dari hutan alam yang ada menjadi hutan tanaman, dan lain-lain, yang mengiringi usaha dibidang hutan tanaman ini.

Apabila ketiga kondisi kawasan hutan seperti tersebut di atas dibiarkan, maka yang akan terjadi adalah adanya lahan dengan produktivitas yang sangat rendah dan pemanfaatan lahan yang tidak/kurang optimal, serta berkecenderungan akan terjadi kerusakan hutan, yang lebih besar utamanya pada kawasan yang tidak dibebani hak dan menjadi kawasan yang terbuka.

### **MULTISISTEM SILVIKULTUR MENJADI PILIHAN**

Untuk mengakomodasi adanya berbagai macam tuntutan terhadap hutan yang terus berkembang dewasa ini seperti diuraikan pada Bab I dan diperkuat lagi dengan kondisi hutan dan kehutanan yang ada saat ini seperti diuraikan pada Bab II, maka pemilihan sistim silvikultur yang lebih dari satu yang disesuaikan dengan karakteristik lahan dan tegakan yang ada melalui penerapan teknik budi daya yang intensif dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan dan peningkatan produktivitas hutan menjadi pilihan yang rasional dan mendesak. Sistim silvikultur sendiri adalah suatu seni dalam pengelolaan hutan produksi lestari atau budidaya suatu hutan dari penanaman sampai dengan pemanenan. Sedangkan multi sistim silvikultur (MSS) adalah suatu sistim pengelolaan hutan produksi lestari yang menggunakan sistim silvikultur lebih dari satu yang diterapkan pada suatu areal ijin usaha pemanfaatan.

### **HAL-HAL YANG PERLU DIANTISIPASI**

Secara teori dan keperluannya, MSS merupakan pilihan terbaik dan mendesak, tapi masih ada beberapa hal yang harus diantisipasi agar dalam implementasi MSS bisa berhasil dan terhindar dari hal-hal negatif yang tidak dikehendaki.

Hal-hal yang perlu diantisipasi, antara lain adalah :

#### **1. Pemilihan kombinasi sistim silvikultur**

Sistim silvikultur yang bisa dikembangkan dalam MSS ini bisa merupakan kombinasi dari sistim-sistim silvikultur TPTI, TPBP, THPA, THPB dan TPTJ, sehingga variannya akan banyak sekali, dan dimasing-masing IUPHHK akan mempunyai kombinasi yang berbeda-beda. Untuk itu perlu ditetapkan batasan-batasan umum bagaimana dan seberapa banyak kombinasi sistim boleh diterapkan dalam tiap IUPHHK. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua, terutama para ahli kehutanan untuk mencari titik optimalnya. Namun hal ini juga akan menjadi peluang bagi para ahli kehutanan untuk berkarya lebih leluasa dan dinamis, sehingga keahlian kehutanan benar-benar akan diperlukan, dan profesi kehutanan akan lebih dihargai.

## 2. Pemilihan jenis tanaman

Pemilihan dan penetapan jenis tanaman yang akan ditanam harus dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai jenis yang akan ditanam dan dikembangkan yang berasal dari luar (eksotik) menjadi pesaing terhadap jenis-jenis tanaman lokal yang bisa menekan pertumbuhan jenis-jenis lokal (jangan yang bersifat alelopathy terhadap tumbuhan setempat). Tetapi dilain pihak jenis yang akan ditanam dengan sistim THPB hendaknya juga mempunyai perbedaan fisik kayu yang jelas dengan kayu-kayu setempat. Hal ini diperlukan karena pada THPB, hasil panennya tidak dikenai DR, sedangkan kayu-kayu hasil penebangan pada sistim TP dikenai DR. Dengan perkataan lain jika jenis kayu yang diproduksi dengan sistim THPB dan sistim TP sama, maka akan menjadi rawan manipulasi dalam laporan produksinya karena yang satu dikenai DR, sedang yang lainnya tidak dikenai DR.

## 3. Persoalan aset

Pada sistim THPB, hasil tanaman merupakan aset Perusahaan, sedang pada sistim TP, hasil tanaman merupakan aset Pemerintah. Dengan demikian perlu diantisipasi bagaimana menetapkan sistim akuntansinya sehingga antara sistim akuntansi dengan praktek dilapangannya sejalan.

## 4. Konflik sosial

Lahan-lahan terbuka yang ada di dalam kawasan hutan sebagian besar sudah dikuasai oleh masyarakat, antara lain merupakan areal peladangan berpindah. Karena itu sistim pengelolaan hutan pada tiap IUPHHK harus dapat mengakomodir persoalan sosial ekonomi masyarakat setempat. Sehingga masing-masing pihak mendapatkan manfaat atas adanya MSS ditempat mereka. Jangan sampai yang satu menghambat/mematikan yang lainnya.

## 5. Regulasi dan Sistem Penilaian

Dengan menggunakan MSS pada satu unit manajemen yang variasi kombinasi sistim silvikulturnya bisa banyak sekali (Kombinasi dari TPTI, TPBP, THPA, THPB, TPTJ), maka diperlukan regulasi yang lebih sederhana tapi mendasar dengan parameter-parameter kinerja yang jelas dan mudah diukur. Sebagai contoh pada cara seperti yang dianut saat ini dimana hanya menggunakan 1 sistim pada tiap IUPHHK saja pengendaliannya sulit dan terjadi ekonomi biaya tinggi, apalagi kalau kombinasi sistim silvikulturnya banyak dan antara IUPHHK yang satu mempunyai kombinasi sistim silvikultur yang berbeda dengan IUPHHK yang lain, maka sistim pengendalinya akan semakin rumit lagi, dan akan mendorong ekonomi biaya tinggi lebih besar lagi, kalau ukuran-ukuran parameter keberhasilannya tidak dibuat sederhana. Dengan demikian maka ukuran-ukuran parameter keberhasilan/kinerja IUPHHK harus dibuat sederhana dan mudah diterapkan. Demikian pula dengan diberlakukannya MSS maka banyak sekali regulasi yang harus diperbaiki dan disesuaikan terlebih dahulu agar MSS bisa berjalan dengan baik, benar dan efektif.

## 6. KPH

Persoalan-persoalan di atas sebagian akan hilang/berkurang bila KPH sudah terbentuk. Karena KPH mempunyai hak otonomi yang lebih luas dalam mengelola kawasan hutan, namun untuk membangun KPH ternyata masih banyak kendala yang harus diatasi.